

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI OLEH PEMERINTAH

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian pengawasan

Istilah “Pengawasan” adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya.⁶

2. Fungsi Pengawasan pemerintah terhadap Industri

Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur di bidang industri dalam melaksanakan tugas pokok Pemerintahan di bidang industri, baik tugas-tugas rutin maupun tugas pembangunan dan
- b. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan agar pelaksanaan program kegiatan rutin maupun pembangunan di bidang industri khususnya karet dapat berhasil dengan efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

⁶ Gita Kuntadi, *Klasifikasi Istilah Teknik Auditing di lingkungan Pemerintahan*

Dalam rangka penyempurnaan efisiensi aparatur akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kemampuan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan industri,
- (b) Meningkatkan kemampuan dan pembinaan aparatur kepegawaian berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, meningkatkan disiplin kerja dan sebagainya
- (c) Meningkatkan dan melanjutkan usaha penertiban operasional pelaksanaan tugas dalam rangka memberantas penyimpangan pelaksanaan tugas yang dapat mengakibatkan pemborosan-pemborosan,
- (d) Menyempurnakan administrasi yang mencakup administrasi keuangan, administrasi perlengkapan, administrasi perkantoran ketata-usahaan serta pengumpulan data dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran realisasi keuangan,
- (e) Menyempurnakan organisasi dan tatalaksana sistem pelayanan secara terus menerus yang meliputi kelembagaan, mekanisme prosedur dan tatakerja termasuk pembakuan dan sistem pelaporan dan seba-

(f) Menyempurnakan sistem informasi tentang kebijaksanaan di bidang industri.

Agar pelaksanaan kebijaksanaan serta kegiatan berjalan menurut rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka fungsi pengawasan ditingkatkan yang mencakup pengendalian, penilaian pelaksanaan pembangunan dan pengambilan tindakan penertiban yang sifatnya represif dan preventif.

Peningkatan fungsi pengawasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan semua kebijaksanaan dan program di bidang industri dapat diikuti, dan dapat diambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terjadi hambatan, penyimpangan dan penyelewengan lainnya.

Fungsi pengawasan tidak semata-mata diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal dan lain-lain aparat pengawasan, tetapi juga merupakan kegiatan dan tanggung jawab yang melekat pada fungsi Pimpinan setiap satuan organisasi Departemen/Instansi. Usaha pengawasan yang bertujuan meningkatkan ketertiban demi terwujudnya aparat pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab akan ditingkatkan berdasarkan program yang berencana, terarah dan terpadu.⁷

Pengawasan tidak hanya terbatas pada program-program fisik, tetapi harus pula dikembangkan mencakup pengawasan terhadap mutu pelayanan

dan mutu jasa yang diberikan aparatur negara kepada masyarakat. Untuk itu ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- (a) Menyusun dan atau penyempurnaan pedoman pengawasan dan pemeriksaan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- (b) Mengumpulkan dan mengolah data yang dapat dipercayai kebenarannya sebagai bahan pengawasan dan pemeriksaan;
- (c) Meningkatkan mutu aparat pengawasan fungsional baik mengenai ketrampilan dan pengetahuan teknis maupun ketrampilan dan pengetahuan administrasi;
- (d) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap program rutin maupun proyek pembangunan;
- (e) Meningkatkan kegiatan analisa dan evaluasi hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah sesuatu kegiatan itu mencapai atau sekurang-kurangnya mengarah kepada sasaran yang telah ditentukan;
- (f) Meningkatkan kegiatan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program oleh unsur aparatur dalam lingkungan

- (g) Meningkatkan pengawasan operasional dari unsur pimpinan dari setiap satuan organisasi terhadap pelaksanaan tugas oleh pejabat bawahannya.

3. Tugas dan pengawasan Industri oleh Pemerintah

Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis pengawasan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/ kekayaan negara, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/ lembaga/ wilayah, pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perindustrian, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang industri dan distribusi
- b. penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan bidang industri dan distribusi terhadap kegiatan pengawasan DDKD dan ADID lainnya

- c. **penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurusan barang milik/kekayaan negara, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah bidang industri dan distribusi**
- d. **pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bidang industri dan distribusi**
- e. **evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan bidang industri dan distribusi**
- f. **analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang industri dan distribusi di lingkungan BPKP dan APIP.⁸**

Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi terdiri dari:

- a. **Subdirektorat Pengawasan Industri dan Distribusi I**
- b. **Subdirektorat Pengawasan Industri dan Distribusi II**
- c. **Kelompok Jabatan Fungsional**

4. Pengawasan serta pengembangan produksi karet oleh pemerintah

Lokakarya Nasional Pemuliaan Tanaman Karet 2009 dilaksanakan pada tanggal Tahun 2009 dan seterusnya di Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan pengarahannya dari Menteri Kehutanan, Kepala Badan Litbang Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. Sesuai dengan kesepakatan

... ..

- a. Prospek industri karet alam diperkirakan akan tetap baik, walaupun pada saat ini krisis keuangan masih melanda beberapa negara konsumen. Dengan harga karet alam yang relatif masih baik, Indonesia harus mampu mendorong pengembangan industri karet yang efisien dan berdaya saing tinggi, sehingga komoditas karet tetap menjadi penghasil devisa yang handal bagi negara.⁹
- b. Potensi pengembangan karet alam Indonesia terutama ada di perkebunan karet rakyat yang luasnya mencapai $\pm 2,8$ juta hektar, tetapi sebagian besar (85%) tanaman karet rakyat tergolong kurang produktif, karena minimnya pemeliharaan dan penggunaan bibit karet yang tidak berkualitas. Pemerintah telah menetapkan target produksi karet alam Indonesia sebesar 4 juta ton pada tahun 2010 keatas. Sasaran tersebut hanya dapat dicapai apabila minimal 70 - 80% areal perkebunan karet rakyat telah menggunakan klon-klon unggul disertai dengan penerapan teknologi budidaya yang tepat.
- c. Kegiatan pemuliaan dan seleksi karet di Indonesia dimulai tahun 1910 dan sampai saat ini telah berjalan selama empat generasi dan telah menghasilkan klon-klon unggul terbaru seri IRR. Potensi ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pelaku agribisnis karet dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Untuk mendapatkan optimasi hasil lateks maupun kayu dari klon unggul, pekebun harus memilih klon yang sesuai dengan kondisi

⁹ Sumarmadji, Thomas Wijaya, Sekar Woelan, MP, Mudji Lasminingsih, MS. Lokarya
Berkas: *Manajemen Tanaman Karet* 20000 2010, Hal. 4

agroekosistem penanaman terutama pengembangan ke berbagai daerah sub-optimal serta menerapkan tindakan kultur teknis yang tepat khususnya sistem eksploitasi berdasarkan kemampuan metabolisme lateks, sehingga kesehatan tanaman tetap terjaga dalam jangka panjang.¹⁰

- d. Rekomendasi bahan tanaman karet periode 2010-2014 disusun dengan memperhatikan kepentingan konsumen untuk mengembangkan agribisnis karet baik dari segi kebutuhan lateks maupun kayu. Rekomendasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok klon penghasil lateks, klon penghasil lateks-kayu dan benih anjuran untuk batang bawah, yang merupakan anjuran komersial untuk penanaman skala luas yang disebut sebagai benih bina, dengan komposisi anjuran sebagai berikut:

- 1). Klon penghasil lateks yang terdiri dari setiap daerah khususnya Provinsi Jambi.
- 2). Klon penghasil lateks-kayu
- 3). Benih anjuran untuk batang bawah terdiri dari benih yang berasal dari tanaman monoklonal.

- e. Penyediaan bibit karet yang berkualitas dalam skala luas dari berbagai klon unggul anjuran yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), masih menjadi permasalahan yang mendasar dalam industri perbenihan nasional. Untuk menjamin ketersediaan bibit

¹⁰ Aidi Daslin Sagala, MS. Hananto Hadi. Batam, 5 Agustus 2009. Pembudidayaan serta

unggul bermutu dari klon anjuran, pemerintah secara bertahap mulai memfasilitasi pembangunan kebun entres dan kebun pembibitan batang bawah dengan berbagai instansi terkait dengan melibatkan penangkar benih. Pemerintah juga melakukan pengawasan dan sertifikasi terhadap benih bina yang beredar, agar konsumen terhindar dari penggunaan bibit palsu. Pemberdayaan penangkar benih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem waralaba yang lebih profesional. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan bibit di tingkat produsen benih.¹¹

- f. Strategi pemuliaan karet untuk mengarah target produktivitas 7 – 8 ton/ha/th sudah saatnya terkait dengan program bioteknologi modern. Berbagai aktivitas harus dikembangkan dalam suatu program penelitian terpadu antar disiplin terkait untuk memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penggalan potensi genetik tanaman, diantaranya implementasi seleksi berbantuan marka dalam rangka meningkatkan akurasi seleksi dengan siklus yang lebih singkat, pengembangan setek mikro dengan teknik kultur jaringan untuk pembangunan pembibitan batang bawah klonal.

- g. Pemanfaatan tanaman karet sebagai sumber bahan baku industri kayu nasional perlu dioptimalkan, selain itu perlu dikembangkan penanaman klon-klon lateks-kayu pada hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat (HTR). Klon-klon tersebut difokuskan yang

menghasilkan lateks-kayu, dengan pertumbuhan yang cepat dan hasil lateks yang relatif cukup tinggi.

Dalam upaya serta pengawasan pemerintah dibidang peningkatan industri karet bukan hanya di pengembangan pembaharuan penanaman karet semata, namu pemerintah juga melakukan pengawasan dalam kinerja PT atau perusahaan yang mengelolah karet. Agar implementasi peningkatan karet khususnya di Provinsi jambi dapat dirasakan oleh masyarakat, serta tidak adanya efek dari kegagalan industri baik mengenai limbah atau pencemaran lingkungan dalam memproduksi karet.

Tujuan dari pada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah agr:

- a). Agar harga serta peroduksi karet tetap setabil nilai dan harganya.
- b). Untuk PT sediri dilakukan pengawasan Khusus, agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat mengenai pengelolaan industri karet.
- c). Untuk perkebunan pemerintah telah mengatur serta dalam pengawasanya dalam mengutamakan produktivitas tanah untuk pembudidayaan karet di Provinsi Jambi.

5. Upaya Pemerintah Dalam Pembangunan Karet 2006-2010.

Dalam rangka pelaksanaan serta upaya Pemerintah dalam pembangunan dan peremajaan karet yang sudah menjadi program utama Pemprop Jambi tahun 2006 dan seterusnya karena sudah diputuskan dan dituangkan dalam anggaran, maka melalui Dinas Perkebunan akan meremajakan 17.500 hektar karet rakyat dan dibarengkan pada tahun 2010

nanti sekurang-kurangnya 130 ribu hektar sudah diremajakan, maka untuk membantu Dinas Perkebunan melaksanakan program perdana tersebut diminta kesiapan beberapa instansi terkait seperti Badan Pertanahan, Dinas Koperasi. Dan UKM, Dinas Tanaman Pangan, BAPPEDA. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jambi DRS H ANTONY ZEIDRA ABIDIN dalam rapat Peremajaan Karet rakyat tahun 2006 di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi (Rabu 26/4-2006).

Menurut Wakil Gubernur, hal ini adalah pekerjaan besar dan penting bertujuan bagaimana bisa mengembalikan karet sebagai hasil utama Jambi. Karet adalah penghasil devisa yang terbesar non Migas pada saat ini selain Sawit, Kopi dan komoditi lainnya. Volume ekspor Jambi tahun 2004 sebanyak 236.287 ton senilai Rp. 2,43 trilyun dan akhir tahun 2005 volume ekspor 274.571 ton senilai 2,98 trilyun rupiah.¹² Gubernur Jambi DRS H ZULKIFLI NURDIN telah mencanangkan tahun 2006 ini sebagai kebangkitan karet rakyat Jambi yang sudah mulai ditanam sejak 100 tahun lalu dan sebelum Merdeka (1920-1930) karet Jambi mengalami masam keemasan, saat ini masih tetap sebagai sumber pendapatan utama petani, karet merupakan tanaman industri yang mempunyai prospek sangat baik.

Dinas Tanaman Pangan diharapkan bisa memecahkan persoalan ketika selama lima tahun lahan karet yang baru diremajakan bisa dimanfaatkan untuk padi gogo, kedele, jagung. Dari BPN untuk memberikan kepastian hukum pensertifikatan yang diperlukan, diperkirakan

8.000 sampai 10.000 sertifikat yang juga bermanfaat untuk pendanaan berikutnya yang melibatkan perbankan.

Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jambi IR SUPRANTO ARIBOWO dalam pemaparannya mengatakan bahwa total tanaman karet di Propinsi Jambi seluas 557.042 ha yang tersebar di 9 Kabupaten kecuali Kota Jambi (105.566 tanaman belum menghasilkan, 330.820 ha tanaman menghasilkan, 130.656 ha tanaman tua). Sebanyak 17.500 ha karet tua akan diremajakan pada tahun 2006 ini yang akan dilaksanakan di 9 kabupaten.

Pelaksanaan peremajaan karet dilaksanakan melalui kerjasama Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemprop Jambi memberikan bantuan bibit, pupuk, pestisida dan insentif petugas lapangan. Pemkab melakukan penetapan calon petani calon lahan (CP/CL). Di lahan petani ada lkaret tua, mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2005 tanggal 2 Agustus 2005, bahwa kayu karet bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan pengolah kayu, ada 2 perusahaan yang mengajukan izin yakni PT PSUT Muaro Jambi dan PT STUD Tanjab Barat, diharapkan kayu karet yang ditebang bisa dipakai oleh perusahaan tersebut, petani terima bayaran sesuai dengan kubikasi yang ada di lapangan dengan harga kurang lebih Rp. 300.000,- per meter kubik, dan petani boleh bekerja di tempatnya sendiri dalam rangka menabung pohon dan akan dibayar oleh

B. Definisi serta Gambaran Umum Industri

1. Pengertian Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.¹³

Defenisi lain menyatakan bahwa industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya. Secara umum definisi mengenai industri bermacam-macam namun pada dasarnya pengertiannya tidak berbeda satu sama lainnya, adapun definisi menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Dari beberapa pengertian industri maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa.

2. Peran Penting Industri dalam Ekonomi

Pembangunan industri mempunyai peranan yang sangat penting da-

lam rangka usaha tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang. Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara sasaran bidang ekonomi yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pembangunan jangka panjang adalah terciptanya struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Untuk mencapai tujuan ini bidang industri dan pertanian akan ditingkatkan.

Dalam pembangunan industri dititik beratkan pada industri yang mengolah bahan mentah. Berdasarkan hasil-hasil pembangunan dan sesuai dengan tahap-tahap pembangunan bidang ekonomi yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara maka prioritas akan diberikan pada industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

Dengan demikian sebagian besar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi sendiri, sedangkan landasan ekspor bertambah kuat, karena bergeser dari ekspor bahan mentah ke arah ekspor hasil produksi industri dalam negeri.

Pembangunan industri pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai terwujudnya Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.¹⁴

Untuk mencapai sasaran pemerataan pembangunan dan hasilnya

maka kegiatan pembangunan industri akan dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, produksi barang-barang pokok dengan harga yang terjangkau masyarakat banyak, peningkatan prakarsa dan usaha masyarakat dalam industri berukuran menengah dan kecil, peningkatan partisipasi masyarakat dalam industri berukuran besar dan menengah, dan perluasan kegiatan pendidikan dan latihan.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi kegiatan pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui peningkatan produksi di segala bidang industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Tercapainya kedua sasaran tersebut akan membantu kemantapan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Kemudian melihat pertumbuhan industri karet yang ada di Indonesia misalnya Provinsi Jambi yang mempunyai tujuan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha maka pembangunan industri akan diarahkan kepada pengembangan industri kecil dan sedang yang sifatnya padat karya.¹⁵

Dalam hubungan ini akan diusahakan agar kebijaksanaan disain dan teknologi industri khususnya di bidang perkebunan karet akan menekankan syarat padat karya dalam batas-batas produktivitas dan efisiensi yang ekonomis masih dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan-tujuan lain daripada pembangunan industri karet adalah untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh rakyat banyak

¹⁵ Ibid. Hlm. 5-6.

sesuai dengan pola hidup sederhana. Industri karet ini akan diproduksi dalam jumlah-jumlah yang cukup besar dengan biaya serendah mungkin, sehingga berada dalam jangkauan rakyat banyak. Industri karet yang menghasilkan barang ini akan didorong perkembangannya.

Sebaliknya akan dihindarkan pembangunan industri karet yang hasil-hasilnya merupakan rangsangan bagi timbulnya pola konsumsi mewah di dalam masyarakat. Tujuan lebih lanjut daripada pembangunan industri adalah untuk memproduksi barang-barang sehingga sebagian besar dari kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi sendiri, dan barang-barang yang dapat diekspor sehingga landasan ekspor bertambah kuat.

Tercapainya sa-saran ini akan menambah penghasilan devisa, karena adanya penghematan melalui pengurangan impor maupun karena peningkatan penghasilan devisa.

Untuk mencapai sa kan pengembangan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Tujuan berikut daripada pembangunan industri karet adalah untuk menunjang kegiatan pembangunan sektor pertanian. Dalam hubungan ini akan dikembangkan industri alat-alat pertanian, pupuk dan insektisida.

Di samping itu akan dikembangkan industri pengolahan karet yang menggunakan bahan baku pertanian. Di samping langkah-langkah tersebut di atas dan dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan industri akan ditempuh beberapa kebijaksanaan dan langkah-langkah

lainnya, misalnya:

- a. Sektor industri akan dikonsolidasikan sedangkan kemampuannya akan dikembangkan melalui peningkatan potensi produksi yang telah ada serta meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya.**
- b. Peningkatan kemampuan industri ditujukan untuk mempertinggi daya saing barang-barang hasil industri karet di pasaran dalam negeri maupun di pasaran luar negeri. Untuk ini akan ditingkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan keteknikan.**
- c. Di samping itu pembinaan sektor industri karet akan dilaksanakan sesuai dengan peranan dan fungsinya, agar secara keseluruhan dapat mewujudkan suatu pola industri yang terpadu dan serasi. Dapat ditambahkan pula, bahwa akan diusahakan agar pertumbuhan industri berjalan serasi dan seimbang dengan sektor-sektor lain, sehingga dapat menunjang perkembangan sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian, serta mengurangi ketimpangan antar sektor industri itu sendiri. Dalam hubungan ini langkah yang akan diambil, adalah perbaikan struktur industri agar selain meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan rakyat juga dapat menghasilkan devisa.**

Dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat akan diutamakan pengembangan industri karet dan industri yang menghasilkan bahan-bahan bangunan murah secara massal dengan menggunakan bahan

bahan yang terdapat di dalam negeri. Melalui pening-katan produksi bahan-bahan tersebut.

3. Gambaran Umum Organisasi PT / Industri Karet

a. Nama PT

PT. DJAMBI WARAS merupakan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri pengolahan karet. Perusahaan ini berdiri sejak awal pengelolaan di wilayah Provinsi Jambi, telah mengolah karet rakyat menjadi crumb rubber.¹⁶ Karet rakyat tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Tanah Datar, Sijunjung, dan Sitiung. Selain dari daerah-daerah tersebut karet rakyat tersebut juga berasal dari beberapa provinsi seperti provinsi Jambi daerah perkebunan. Hal ini telah dicatat dalam penerapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah di daftarkan sebagai PT yang masih eksis dalam mengelola Industri Karet. Disebutkan bahwa kegiatan perusahaan ini meliputi pengolahan getah untuk menghasilkan produk dari karet.¹⁷

b. Visi Organisasi

Visi Organisasi PT. P&P Lembah Karet adalah “Kami Utamakan Mutu Secara Terpadu”. Hal ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi untuk pengembangan dan peningkatanyang berkesinambungan bagi produksi PT.

¹⁶ Ellisa. 2008. *Gambaran Umum Organisasi PT*. Hlm. 2.

¹⁷ Menteri Kehakiman Republik Serikat pada tanggal 24 Juli 1950 dengan nomor J.A 5/23/18 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Padang dengan nomor 26/1051/4 pada tanggal 1 Maret

c. Misi Organisasi

Misi yang dimiliki oleh organisasi PT. DJAMBI WARAS adalah berupa sasaran mutu, yaitu:

1. Menghasilkan mutu SIR yang memenuhi standar (SNI-06-1903-2000) dengan tingkat kegagalan 1 %.
2. Memenuhi permintaan pelanggan 100%

d. Uraian Jabatan PT. DJAMBI WARAS

Untuk mencapai tujuan perusahaan, PT. DJAMBI WARAS berusaha mengelola manajemen perusahaan dengan membagi dalam beberapa bagian yang memiliki fungsi, tugas-tugas dan aktivitas yang bervariasi. Uraian jabatan setiap level manajemen pada PT. DJAMBI WARAS dapat dilihat dari Jabatan dalam tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur

- 1). Personil yang bertanggung jawab penuh maju mundurnya perusahaan
- 2). Personil yang menandatangani akte kredit suara penting lainnya yang menyangkut kelancaran perusahaan
- 3). Personil yang memutuskan segala sesuatu yang tidak biasa diatasi oleh yang bersangkutan dalam perusahaan

- 4). Menetapkan kebijakan mutu dan memberi komitmen terhadap pelaksanaan sistem mutu
- 5). Menyetujui kontrak dari perwakilan di luar negeri
- 6). Menetapkan struktur organisasi
- 7). Bertanggung jawab terhadap pengesahaan dokumen sistem manajemen mutu.

4. Dampak limbah industri karet terhadap lingkungan

Keberadaan PT DJAMBI WARAS Provinsi Jambi sebagai pengelolah industri karet yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan misalnya seperti pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran bagi masyarakat perlu adanya pengawasn pemerintah daerah Kabupaten tentang dampak limbah terhadap lingkungan. Yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah adalah tentang bagaimana mengatur kinerja PT. DJAMBI WARAS Provinsi Jambi sehingga ada konsekuensi atau sangksi dalam peraturan yang mengatur tentang oprasional PT terhadap lingkungan.

Yang harus diperhatikan berkaitan dengan limbah karet dari PT DJAMBI WARAS adalah:

- a. Penentuan arel pembuangan limbah yang aman bagi masyarakat
- b. Oprasional PT seharusnya tidak mengganggu kenyamanan dalam masyarakat.

c. Dampak negatif dari PT harus lebih diperhatikan

5. Kewajiban Pengelolaan Industri Karet

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama berbagai pihak baik pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat Indonesia sebagai negara yang perkembangan industrinya cukup tinggi dan saat ini dapat dikategorikan sebagai negara semi industri (semi industrialized country).

Sebagaimana lazimnya negara yang masih berstatus semi industri, target yang lebih diutamakan adalah peningkatan pertumbuhan output, sementara perhatian terhadap eksternalitas negatif dari pertumbuhan industri tersebut sangat kurang. Beberapa kasus pencemaran terhadap lingkungan telah menjadi topik hangat di berbagai media masa, misalnya pencemaran sungai yang terjadi di Provinsi Jambi yang berdampak terhadap timbulnya bermacam penyakit yang menyerang penduduk yang tinggal di sekitar daerah itu.¹⁸

Pemerintah dan khususnya pemerintah daerah Kota Jambi sebagai regulator seharusnya memberi perhatian terhadap kondisi lingkungan di daerahnya. Namun salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas, pengendali dan pengelola lingkungan adalah masalah dana.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan pungutan retribusi perijinan pembuangan limbah cair sebagai alternatif bagi daerah untuk memperoleh

dana dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pencemaran lingkungan terutama pencemaran yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah cair ke badan sungai.

6. Pengaruh Industri Karet

a. Pengaruh Positif

Berkembangnya industri di dalam negeri khususnya Provinsi Jambi disadari mampu memberikan pengaruh positif berupa berkembangnya perekonomian nasional yang selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas, meningkatnya devisa negara dari ekspor, meningkatnya penerimaan negara baik dari pajak maupun non pajak (PNBP), dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.

b. Pengaruh Negatif

Tumbuhnya industri karet ternyata membawa efek negatif berupa timbulnya pencemaran lingkungan di daerah atau kota yang terdapat banyak sentra industri. Pencemaran lingkungan umumnya terjadi oleh pencemaran udara (polusi) dan pencemaran air yang timbul dari pembuangan limbah cair (liquid) dan padat (solid).

Mengingat air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi keberadaan sumber-sumber air disertai dengan upaya melakukan pencegahan terhadap pencemaran air melalui pengaturan peraturan pembuangan limbah cair. Langkah yang dilakukan

oleh pemerintah antara lain berupa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dimana di dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air dapat dilakukan dengan ijin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.¹⁹

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, ditandai dengan berlakunya UU no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota, maka PP no.20 Tahun 1990 diamandemen dengan PP no. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang isinya antara lain mengalihkan wewenang pengaturan perijinan pembuangan limbah cair dari Gubernur kepada Bupati/Walikota.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian ijin tersebut mempersyaratkan kepada perusahaan atau industri untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan sampai kepada suatu kadar yang tidak berbahaya sebelum dibuang kedalam air. Namun dalam prakteknya, perusahaan atau perorangan belum melakukan pengolahan sebagaimana mestinya (belum optimal) sehingga limbah cair yang dibuang ke badan air menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran air pada sungai-sungai dan pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak negatif tersebut agar badan air dapat difungsikan kembali bagi keperluan masyarakat. Salah satu upaya yang layak

dipertimbangkan oleh pemerintah daerah adalah kemungkinan pengenaan retribusi atas ijin pembuangan limbah cair di daerah. Dana yang diperoleh dari hasil pemungutan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali dampak pembuangan limbah cair terhadap kerusakan lingkungan.

Untuk itu, studi telah dilaksanakan dan telah pula dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan/kelayakan penerapan retribusi atas perijinan pembuangan limbah cair tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh industri karet. Oleh sebab itu maka dalam melangsungkan oprasional industri, maka perlu diadakan pengawasan serta pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan industri, PT, serta Pabrik yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.

7. Defenisi Limbah dalam Industri Karet

a. Pengertian Limbah

Ada beberapa macam limbah seperti limbah padat, limbah cair, limbah beracun (B3), pulusi udara, dan polusi suara.

1). Limbah Padat

Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta dari tempat-

tempat umum. Jenis-jenis limbah padat: kertas, kayu, kain, karet/kulit

tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur. Kesemuanya itu adalah jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

2). Limbah B3

Sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam peraturan pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 terbagi atas dua macam yaitu yang spesifik dan yang tidak spesifik. Perbedaan pokok antara limbah B3 spesifik dan tidak spesifik terletak pada cara penggolongan yaitu pada limbah spesifik digolongkan kedalam jenis industri, sumber pencemaran, asal limbah, dan pencemaran utama sedangkan pada limbah tidak spesifik penggolongannya atas dasar kategori dan bahan pencemar.²⁰

3). Polusi Udara

Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh berberapa partikulat zat yang mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon (asap kabut fotokimiawi), karbon monoksida dan timah.

4). Limbah Cair

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair (PP 82 thn 2001). Jenis-jenis limbah cair digolongkan sebagai berikut:

- a. Fisika dan Sifat Agregat Keasaman Metoda Titrimetrik**
- b. Parameter Logam Arsenik (As) Metoda SSA**
- c. Anorganik non Metalik Amonia (NH₃-N) Metoda Biru Indofenol**

²⁰ Daryono, Jay, K. D., "Perubahan Pengelolaan Air Limbah - Alternatif Restoran Tesis"

- d. Organik Agregat Biological Oxygen Demand (BOD)
- e. Mikroorganisme E Coli Metoda MPN
- f. Khusus Asam Borat (H3 BO3) Metoda Titrimetrik
- g. Air Laut Tembaga (Cu) Metoda SPR-IDA-SSA

Beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian dan kegiatan yang berhubungan dengan limbah cair adalah :

- a. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan fosil
- b. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah seperti akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara
- c. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas tetap dalam kondisi alamiahnya.²¹

Bentuk serta jenis limbah diatas adalah merupakan dampak yang terjadi terhadap lingkungan atas keberadaan oprasional pabrik PT yang mengelolah karet di daerah Provinsi Jambi.

8. Pengaturan Ijin Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan oleh industri memang volumenya tidak sebesar limbah cair yang dihasilkan oleh rumah tangga dan non industri

²¹ Rotinsulu, Jeannie Connie, "Implementasi Sistem Perdagangan dan Investasi yang Berwawasan Lingkungan", Manado, 2000. hlm 40.

atau limbah domestik. Namun dari sisi kualitas, limbah cair yang dihasilkan oleh industri jauh lebih berbahaya dan skala kerusakan yang ditimbulkannya terhadap mutu air sungai sangat besar. Untuk itu diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap industri dalam pembuangan limbah cair yang mereka hasilkan.

Dalam undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup memang telah diatur persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan limbah industri yang juga dilengkapi dengan sanksi-sanksi bila perusahaan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam prakteknya pencemaran terhadap mutu air sungai terutama yang disebabkan oleh limbah cair masih terus berjalan. Untuk itu dipandang perlu tindakan aktif dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan atau konservasi terhadap lingkungan sungai.

Akan timbul permasalahannya kalau pemerintah daerah secara sepihak harus mengeluarkan biaya atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan maka hal ini jelas tidak adil. Oleh karena itu untuk alasan keadilan, perusahaan/Industri harus dilibatkan dalam pengelolaan limbah cair ini tidak hanya dari sisi kualitas limbah cair yang dibuang tetapi juga atas kerusakan yang telah terjadi akibat dari pembuangan limbah cair yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu.²²

Keterlibatan perusahaan/industri dalam penanggulangan kerusakan lingkungan adalah berupa partisipasi dana dalam bentuk pembayaran retribusi atas perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/industri untuk dapat membuang limbah cairnya ke sungai.

Perlu dicatat bahwa ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan/industri untuk membuang limbah cair ke sungai bukan berarti bahwa perusahaan dapat dengan seenaknya membuang limbah cair ke sungai. Karena ijin yang diberikan tersebut berisi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut membuang limbah cair ke sungai. Persyaratan tersebut antara lain bahwa perusahaan telah mengolah terlebih dahulu limbah cair yang dihasilkan sampai mencapai suatu standar keamanan tertentu sebelum dapat dibuang ke sungai. Dalam mekanisme perijinan tersebut diatur pula kewajiban perusahaan untuk secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, melakukan pemeriksaan sampel limbah cair yang dihasilkan ke laboratorium yang ada di daerah, baik itu laboratorium milik Pemerintah Daerah atau laboratorium swasta yang telah ditunjuk untuk menjaga agar limbah cair yang dibuang tetap dalam batas baku mutu air.

C. Strategi Kebijakan Pembangunan Industri Karet Provinsi Jambi

1. Kebijakan Dalam kesejahteraan masyarakat

Adanya kenyataan bahwa kondisi sosial dan ekonomi petani karet di daerah Provinsi Jambi mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini akan

mengakibatkan Pemerintah Indonesia semakin intensif melaksanakan berbagai program pembangunan di daerah khususnya pedesaan.²³

Starategi kebijakan yang akan di lakukan oleh pemerintah daerah Jambi adalah dengan melihat bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang industri karet.

Secara umum mengenai strategi yang diterapkan pemerintah untuk membangun perkebunan karet-rakyat untuk mendorong jalanya industri adalah:

- d. Pemerintah membentuk pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi, dengan sasaran untuk menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat. Program ini bertujuan untuk memperbaiki mutu olahan karet-rakyat sehingga dapat mempengaruhi terbentuknya industri serta pabrik yang ada di Provinsi Jambi.
- e. Melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP). Di daerah Propinsi Jambi, program ini lebih dikenal dengan istilah industri karet. Sistem ini diharapkan mampu berfungsi sebagai pembina petani karet secara menyeluruh, meliputi dari masalah penanaman hingga persoalan pemasaran, baik di PT maupun Pabrik.

Strategi program pembangunan yang diterapkan pemerintah tersebut selain untuk memperbaiki kondisi pendapatan petani, juga dalam jangka

panjang diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial petani. Strategi dan program *pertama* dilaksanakan hampir di seluruh daerah yang menjadi sentra-sentara produksi karet rakyat di Jambi. Di tahap-tahap awal pelaksanaan program ini banyak sekali petani yang merespon positif. Karena dipandang dalam menyukseskan program tersebut, pemerintah mengeluarkan seluruh daya dan upayanya, meskipun tidak jarang ada unsur pemaksaan dari oknum agar petani berkenan membawa dampaknya ke pusat pengolahan yang dibangun oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan target proyek PT maupun Perusahaan, karenanya kurang memperdulikan jenis-jenis keluhan petani yang ada. Pola seperti ini sebenarnya merupakan pola yang tidak dikehendaki oleh petani, karena menurut pandangannya dalam pelaksanaan program ini, pemerintah cenderung memaksakan kepentingannya sendiri untuk mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan lebih dahulu di belakang meja.

Salah satu keluhan para petani dalam pelaksanaan program ini adalah kesulitan untuk mematuhi peraturan dalam kriteria standar kadar karet-kering tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Kebiasaan petani sebelumnya tidak pernah memperhatikan kriteria standar kadar karet kering ini. Tapi setelah masuknya program pemerintah tsb, justru banyak sekali peraturan yang dianggap membebani kegiatan usahatani karet mereka. Hal ini ialah mengenai petani karena penanganan berkebun karet selama tuju-

temurun, persoalan ini tidak pernah menjadi hambatan, dan kenyataannya objek mereka juga laku terjual atau dibeli oleh para tengkulak.

Seiring dengan perjalanan waktu, program pemerintah ini pada akhirnya kalah bersaing dengan para tengkulak dan induk somang dalam menampung produksi karet-rakyat. Karena para tengkulak dan induk somang lebih banyak mengetahui apa yang diinginkan oleh para petani, disamping mereka telah lama menjalin hubungan sosial dengan pekebun karet.

Sementara Pemerintah dalam koridor untuk menyejahterakan rakyatnya, selain hanya mengejar target kepentingannya sendiri, juga justru sering menganggap terhadap para tengkulak dan induk somang sebagai musuh petani dan musuh pemerintah dalam pemasaran karet-rakyat. Dilupakan yang terjadi sesungguhnya adalah hubungan antara petani dengan para tengkulak dan *induk somang*, tidak hanya sekedar hubungan dagang semata, tapi lebih dari itu, terdapat ikatan sosial mereka yang sudah begitu kuat dan mengakar lebih lama.²⁴

Hal ini yang kurang diperhitungkan oleh program proyek pemerintah sejak masa Orde-lama, Ordebaru, sampai pemerintahan Orde-terakhir. Karena pola dan strategi program pemerintah seperti itu, maka belakangan berdampak kurang baik terhadap para petani karet di Jambi, sehingga program tersebut gagal dalam memenuhi esensi tujuan dan sasaran pembangunan yang hakeki. Para petani mengetahui bahwa program tersebut

²⁴ Mubvarto dan Dewanta, Awan Setrawan, 1991, *Karet: Kajian Sosial Ekonomi*, Aditiro Media

lebih banyak untuk memenuhi kepentingan politik pemerintah yang mengejar peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena keinginan pemerintah yang menggebu-gebu tersebut yang justru sering melupakan kepentingan utama, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Karena itu, maka pada akhirnya petani kurang merasakan manfaat adanya pembangunan sentra-sentra penampungan produksi karet yang dibuat oleh pemerintah di dekat Lokasi kebun petani, sebab selama ini tidak menyentuh langsung kepada kepentingannya, apalagi meningkatkan taraf hidup keluarganya.

2. Program kedua dalam perkembangan industri karet

Kegagalan program yang pertama, mendorong pemerintah untuk mengembangkan strategi strategi *kedua* yang melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk UPP. Salah satu usaha ini di Jambi dikenal dengan istilah industri karet yang utamanya ditujukan untuk membangun dan mengembangkan perkebunan karet-rakyat.²⁵

Sebagaimana program yang pertama, industri karet ini juga kental dengan nuansa “modernisasi”. Oleh karena itu tidak mustahil bahwa untuk melaksanakan kelancaran proyek ini perlu memenuhi persyaratan tertentu dan dana yang diharuskan oleh sistem tersebut.

Dalam pembangunan industri karet ditargetkan peningkatan pendapatan petani harus mencapai minimal US \$ 1.500 per tahun. Artinya

proyek ini dikatakan berhasil jika para petani yang dibinanya mampu menghasilkan pendapatan dalam setahun sebesar US \$ 1.500.

Untuk itu setiap petani yang ingin menjadi peserta proyek karet harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain:

- a. petani harus mempunyai kebun karet minimal 2 ha, berusia tidak lebih dari 45 tahun, jarak antara kebun dengan rumah tidak lebih dari 1 km, dsb.
- b. Selain itu dalam pelaksanaannya, ternyata para petani juga masih dibebani dengan persyaratan teknik budidaya yang menurut mereka masih “asing”, meskipun bagi manajemen proyek sudah menjadi standar yang sudah *given* harus dilaksanakan. Standar baku modernisasi perkebunan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menggunakan teknologi baru, seperti memakai bibit unggul, pupuk lengkap, pengendalian hama/penyakit sampai teknik penyadapan.²⁶

Kenyataan dilapangan diatas adalah menunjukan program Pemerintah Daerah Kota Jambi yang sudah dilaksanakan hingga sekarang. Apabila program tersebut dapat berhasil maka akan banyak keberhasilan dar sektor lain yang di rakasakan masyarakat misalnya:

- a. Keberhasilan serta kelancaran Pabrik PT yang bergerak dibidang industri karet yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar kebun

- c. Dapat menghasilkan retribusi daerah yang memiliki hasil yang maksimal dibidang industri karet.

3. Peranan Perkebunan Karet dalam Membangun Masyarakat Petani di Jambi

Konsep pembangunan dewasa ini lebih banyak dimaknai oleh sebagian besar petani hanya sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara dengan jalan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Artinya berhasil atau gagalnya program pembangunan hanya diukur dari indikator ekonomi semata, serta pembangunan hanya dimaknai sebatas itu, mungkin sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru pembangunan Indonesia sudah nyata menunjukkan kemajuannya. Tapi kenyataannya dapat dilihat dalam pembangunan perkebunan nasional, khususnya dalam pembangunan perkebunan karet. Menurut Mubyarto dan Dewanta (1991), sumbangan ekspor komoditas karet untuk devisa negara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1925, khususnya dari daerah Sumatera Timur. Sumbangan tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan karet-alam dunia. Pada awal masa Orde Baru (1971), sumbangan devisa negara dari karet-alam baru sebesar US \$ 22 juta. Kalau dikaitkan dengan penerimaan ekspor nasional, maka sumbangan dari sektor ini saja mencapai 16%. Pada tahun 1980 penerimaan devisa negara dari sektor perkebunan telah meningkat menjadi US \$ 1.113 juta. Demikian pula halnya yang terjadi dengan pembangunan perkebunan karet-rakyat di Provinsi Jambi. Tujuan pembangunan perkebunan skala mikro adalah untuk

meningkatkan produksi yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Sedangkan dalam skala yang lebih besar (nasional/makro) pembangunan perkebunan untuk meningkatkan sumbangan devisa negara dari sektor perkebunan. Untuk itu, kemudian pemerintah mengadakan dan melaksanakan berbagai proyek pembangunan perkebunan karet-rakyat, seperti SRDP, PIR/NES dan PRPTE. Menurut Rusli dkk (1996), sebagian besar komoditas perkebunan yang merupakan komoditas ekspor dihasilkan oleh perkebunan rakyat yang produktivitasnya masih rendah.²⁷

Memang dengan adanya proyek-proyek perkebunan rakyat tersebut produktivitas karet-rakyat dapat meningkat, dari sebelumnya hanya berkisar antara 300-500 kg/ha/tahun meningkat menjadi 800 kg/ha/tahun.

Namun makna pembangunan sesungguhnya bukan hanya *economic growth* semata. Sebab jika keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari peningkatan indikator ekonomi saja, akan dapat menyesatkan banyak orang. Pada dasarnya hakikat pembangunan tidaklah sesederhana itu. Sebab salah satu makna pembangunan adalah untuk mengadakan perubahan sosial di dalam masyarakat dan pembebasan. Apakah keberhasilan pembangunan tersebut berdampak positif terhadap perubahan masyarakat sekitar dan menjadikan masyarakat lebih otonom, kreatif dan mandiri?. Hal ini perlu

²⁷ Rusli, S. dkk. 1996. *Karet Rakyat di Indonesia*. Tahun 2000. Balai Penelitian Perkebunan

ditinjau dan dikaji lebih jauh secara menyeluruh dari berbagai dimensi sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat seutuhnya.²⁸

Kalau mencermati makna pembangunan sebagai suatu agen perubahan sosial, maka perlu dilihat sejauh mana derajat pembangunan tersebut membawa dampak terhadap perubahan sosial. Sebab perubahan sosial yang dimaksudkan adalah mengarah kepada suatu perubahan lembaga-lembaga (*institutions*) masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem sosial, seperti nilai sosial, sikap dan pola perilaku masyarakat pedesaan. Artinya pembangunan yang dapat dinilai berhasil tentu tidak hanya mampu menunjukkan perubahan-perubahan terhadap indikator ekonomi semata. Namun lebih jauh dari itu, makna dan keberhasilan pembangunan sesungguhnya dapat langgeng jika mampu melakukan perubahan sosial seperti disebutkan tadi. Jika pembangunan bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, maka mutlak harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk mengacuhkan budaya dan norma yang berlaku, sehingga dengan adanya pembangunan, masyarakat merasa diberdayakan, dan tidak hanya dijadikan sebagai subyek pembangunan semata.

Adapun peran industri karet untuk kehidupan masyarakat adalah:

- a. menunjang kebutuhan ekonomi.
- b. Sebagai penggerak untuk kesejahteraan dalam lapangan pekerjaan
- c. Membantu masyarakat dalam keseimbangan sosial.

Industri karet Provinsi Jambi mempunyai peran yang sangat besar bagi masyarakat di wilayah Jambi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat gambar perkebunan karet yang sedang produksi di Provinsi Jambi.

Gambar. I

Gambar Perkebunan Karet Produksi Masyarakat Jambi Tahun 2009-2010



Data Gambar Perkebunan Karet Provinsi Jambi dalam Produksi 2010

Sesuai dengan gambar diatas, Bahwa industri karet mampu melakukan interaksi sosial yang di anggap masyarakat dapat menemukan kesejahteraan dalam hidup sebagai makhluk sosial. Untuk propinsi Jambi adalah merupakan salah satu daerah yang paling banyak mengelola industri karet. Namun dalam kenyataanya bahwa industri karet memiliki dampak negatif maupun positif bagi lingkungan, misalnya:

1. Dengan adanya industri karet di Jambi, maka untuk pengelolaan yang dilakukan pabrik maupun PT, akan membawa pencemaran lingkungan atas limbah yang di seahklan oleh perusahaan

2. Lingkungan menjadi tidak efektif untuk kehidupan sosial karena adanya pengelolaan industri karet.²⁹

Salah-satu dampak negatif ini harus dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk membuat program penyesuaian dalam pengelolaan Industri terhadap Pabrik PT, Khususnya PT Dajambi Waras.